



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

Kata Pengantar

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII – Provinsi Sulawesi Utara

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan Transportasi Darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas Rencana Kinerja tersebut dan Realisasi Anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Manado, 09 Januari 2023

KEPALA BPTD WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA



MANGASI SINAGA, S.E., S.H., M.M.
NIP. 19680729 199703 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2020 – 2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024, BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020 - 2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
5. Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan ini mencakup pelaksanaan sasaran kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Utara telah melaksanakan dengan baik 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$). dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yang kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$), Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100% dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, Pelaksanaan Monitoring yang dilakukan secara berkala, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR	GAMBAR
.....	vi
DAFTAR	LAMPIRAN
.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	I-
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	I-
I.3 Sumber Daya Manusia.....	I-
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-
I.5 Sistematika Laporan.....	I-
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	II-
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	II-
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	II-
II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021	II-
II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021	II-
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	III-
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	III-
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	III-
IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.....	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-

IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda.....	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	III-
A.1.1 Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III

SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	III-
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III
IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	III-
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	III-

A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan.....	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-

A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III
IKK3.7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.....	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane.....	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-

IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru.....	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	III-
IKK3.1.2	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel.....	III-
IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	III-
A.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	III-
A.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-
A.1.3	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-
A.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang..	III-
A.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-
A.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-

III.3 Realisasi Anggaran.....	III-
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2020	III-
III.3.1.1 Pagu Anggaran	III-
A.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021.....	III-
A.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021.....	III-
A.3 Uraian Surat Pengasahan Revisi Anggaran	III-
III.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2021	III-
A.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021	III-
A.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
A.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
A.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021..	III-
III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021	III-
III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-
III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021...	III-
III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021	III-
III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	III-
III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-
III.3.4 Hambatan dan Kendala.....	III-

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup.....	IV-
IV.1.1 Ringkasan Capaian	IV-
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	IV-

BAB 1

LATAR BELAKANG

I.1. LATAR BELAKANG

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, dituntut untuk menyelenggarakan system pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2. TUGAS DAN POKOK FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII – Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Undang Undang PM. 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 154 Tahun 2016 tentang tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII – Provinsi Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe C mempunyai tugas “Melaksanakan pengelola lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

- b. Fungsi

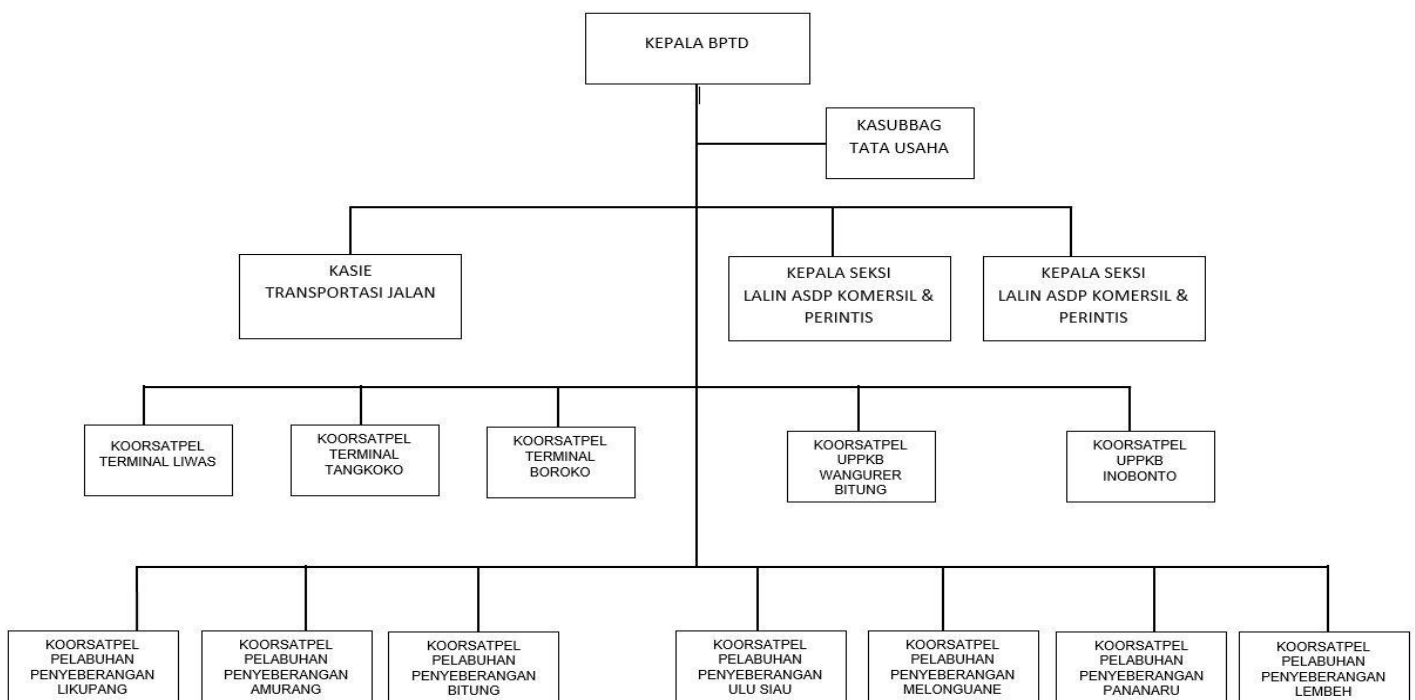
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BPTD Tipe C menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalirasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, pendidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa

kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagan Struktur Organisasi



I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksana kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Mempunyai tugas melakukan pentusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara menaungi sebanyak 269 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kantor Induk / Satuan Pelayanan	ASN	PPNPN
1.	Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara	27	41
2.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Malalayang	6	17
3.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tangkoko Bitung	8	27
4.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Boroko	4	8
5.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bolaang Mongodow	4	8
6.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bitung	6	8
7.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Likupang	4	4
8.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Amurang	2	5
9.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lembeh	2	4
10.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau	5	7
11.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	4	8
12.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	6	9
13.	Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Wangurer Bitung	5	18
14.	Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Inobonto	4	18

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 154 Tahun 2016

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

I.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2019 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - **Bagan Struktur Organisasi**
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
- II.3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- II.4 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022
- II.5 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Transportasi;

- **Uraian Sasaran Program**

IKP1.1 Persentase Keberintisan Angkutan Jalan;

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP1.3 Jumlah Terminal Tipe A- dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun

2021 dan Tahun 2020

- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

SK.1 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

IKP2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe - A;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe - A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP2.3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe - A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

IKP3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE);

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

IKP3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

IKP5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Sasaran Program**

IKP1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat;

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

- **Pagu Anggaran**
- **Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran**
- **Refocusing Anggaran Tahun 2021**
- **Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021**
- **Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2021**

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

- **Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021**

- **Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja**

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Tahun 2022;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2022;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2022;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022;
9. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB 2

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara.

II.2 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	2
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	10
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	90

		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	-
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	2
		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	4
		IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	Laporan	1
		IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	Laporan	1
		IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	Laporan	1
		IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	Laporan	1

		IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	Laporan	1
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.3 URAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan kontrak kerja Tahunan antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 142.982.415.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100

SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	4
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	4
		IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	Laporan	1
		IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	Laporan	1
		IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	Laporan	1
		IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	Laporan	1
		IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	Laporan	1

SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.4 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 142.982.415.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15

SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	4
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	4
		IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	Laporan	1
		IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	Laporan	1
		IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	Laporan	1

		IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	Laporan	1
		IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	Laporan	1
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No.	Kode Kegiatan		Kegiatan	Anggaran
1.	022.03.GA	4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp54.975.856.000
2.		4638	Pelayanan Transportasi Darat	Rp46.713.741.000
3.		4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp13.821.518.000
4.		4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp2.881.900.000
5.	022.03.WA	4670	Program Dukungan Manajemen	Rp15.870.798.000
6.		4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp8.718.602.000
TOTAL				Rp. 142.982.415.000

II.5 URAIAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melakukan Revisi I Perjanjian Kinerja, hal ini dikarenakan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mengalami pengurangan pagu anggaran. Sehingga indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 141.934.585.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90

		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	4
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK 3.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp54.206.356.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp46.435.416.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp13.821.513.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp2.881.900.000
5. Program Dukungan Manajemen	Rp15.870.798.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp8.718.602.000
TOTAL	Rp141.934.585.000

II.6 URAIAN REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melakukan revisi II perjanjian kinerja, hal ini dikarenakan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mengalami pengurangan pagu anggaran. Sehingga Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp.130.212.749.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	4
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di	%	90

			pelabuhan SDP		
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK 3.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp53.712.620.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp36.967.086.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp18.183.615.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp3.880.818.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp7.708.196.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp9.760.414.000

BAB III

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 Dalam Draft Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					66%			72%			87%			92%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	20,33	20%	100	45,75	46%	100	71,44	71,44%	100	96,86	96,86%
IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	11	11%	100	13	13%	100	65,22	65%	100	65,22	65%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A	%	90	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
IKK2.2	Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					55%			55%			69%			95%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0%	100	0	0%	100	70	70%	100	100	100%

IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17	17	11	135%	17	11	135%	17	11	135%	17	11	135%
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	300	0	0%	300	0	0%	300	0	0%	300	300	100%
IKK3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	33	41,25%	80	33	41,25%	80	33	41,25%	80	33	41,25%
IKK3.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%
SK.5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					98,89%			98,89%			98,89%			98,89%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	89	98,89%	90	89	98,89%	90	89	98,89%	90	89	98,89%
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					103,33%			103,33%			103,33%			103,33%
IKK.1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	93	103,33%	90	93	103,33%	90	93	103,33%	90	93	103,33%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						85%			86%			92%			98%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						72%			74%			85%			96%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						9			8			8			10
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						6			6			6			4

Selama tahun 2022, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 IKK dengan IKK Aktif sebanyak 14 IKK BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Unit Kerja di bawah BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan, BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Draft Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dalam IKP membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional
2. IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
3. IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi
4. IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda
5. IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
6. IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

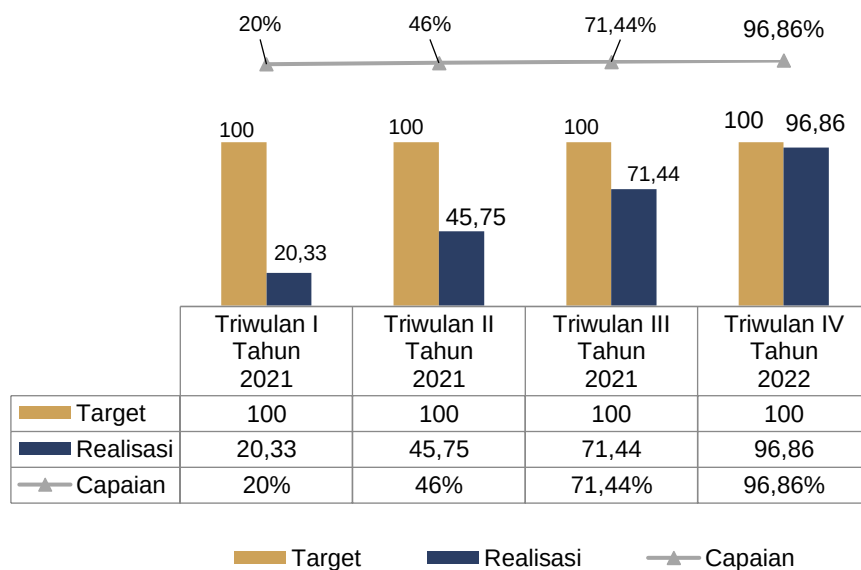
$$= \frac{\text{Jumlah RIT Terealisasi pada tahun 2022}}{\text{Jumlah RIT yang Direncanakan Tahun 2022}} \times 100\%$$

Jumlah Trayek Perintis Angkutan Jalan yang dilayani sebagai berikut :

1. Manado – Ratatotok – Molobog
2. Paaldua – Talawaan – Likupang – Marinsow – Tangkoko
3. Paaldua – Tondano – Kema – Tangkoko
4. Malalayang – Pangkusa – Bintauna
5. Malalayang – Bonawang – Doloduo – Molibagu – Dumangin – Posilagon
6. Melonguane – Beo – Esang – Gemeh
7. Tangkoko – Mahembang – Jikobelanga
8. Melonguane – Bowongbaru – Rainis – Beo
9. Melonguane – Tababo – Bantenan
10. Malalayang – Tababo – Bantenan
11. Malalayang – Lobu – Kalait
12. Ondong – Peling – Tanaki – Bandara Taman Bung Karno (Kab. Kep. Sitaro)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebesar 98,86 jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 96,86%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian.



Gambar III.1 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP – DRJD 9505 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP –DRJD 3385 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran 2, target trayek pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara adalah 11 trayek pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2022, dan dilakukan perubahan kebijakan sehingga pada November sampai dengan Desember 2022 berubah menjadi 12 trayek Keperintisan Angkutan Jalan, dengan jumlah target Ritase sebanyak 9308 Ritase dengan ritase yang tercapai sebanyak 9016 ritase pada tahun 2022.

Penyelenggaraan Subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Petaturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Adapun dua kriteria untuk menetapkan Angkutan Jalan Perintis, yaitu Faktor Finansial dan Keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antar daerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan Kriteria keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan Penyeberangan Perintis atau Angkutan Udara Perintis;

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki trayek tetap dan teratur;
- Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atay fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- Mencantumkan informasi Trayek dan Tarif pada Terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrase pelayanan intra dan antarmoda;
- Memberikan pelayanan Angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan;

- **Faktor Keberhasilan**

- Terlayannya Aksesibilitas Transportasi Darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang di lalui Trayek Angkutan Perintis;
- Pemberian Subsidi bagi Angkutan Perintis adalah untuk menghubungkan antara Daerah, Terisolir Terpencil dan Tertinggal agar dapat mengembangkan Potensi Perekonomian Daerah yang terlayani Subsidi Perintis;
- Keberadaan Bus Keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah tersebut;

- **Faktor Kendala**

- Tidak terserapnya Subsidi Angkutan Perintis;
- Kurangnya Pengawasan sehingga pemberian subsidi tidak maksimal;
- Jumlah Ritase tidak tercapai;
- Bencana alam merupakan factor kegagalan;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{9016}{9308} \times 100 = 96.86$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\%Capaian = \frac{96.86}{100\%} \times 100\% = 96,86\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1,726,599,000. dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 1,115,583,110 atau mencapai 64.61% dengan Nomenklatur Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) – 4637.QAH.002;

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan dilakukan Sosialisasi berkala terhadap Operator pelaksana Subsidi Angkutan Perintis untuk memenuhi RIT Lintasan Subsidi Perintis dengan baik;
- Pengawasan dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Keperintisan Angkutan jalan dilakukan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik;
- Akan dilakukan Evaluasi berkala terhadap RIT Subsidi yang tidak terlaksana di karenakan factor cuaca dan kendaraan;
- Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan Anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2022 sebesar 96,86 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 96,86% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebesar 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 100% menjadi 96,86% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SS 1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas						
1	2020	IK.1	8	8	100%	-
SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.1	100	100	100%	-
3	2022	IKK.1	100	96,86	96,86%	Turun

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2022 sebesar 96.86 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 100. Maka capaian kinerja mencapai 96,86%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan maka capaian kinerja mencapai 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1	100	100	100%	-
2	2022	IKK.1	100	96,86	96,86%	Turun

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Simpul Transportasi Nasional terdiri dari Terminal Tipe A, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) dan Jumlah Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional); Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara digunakan rumus sebagai berikut:

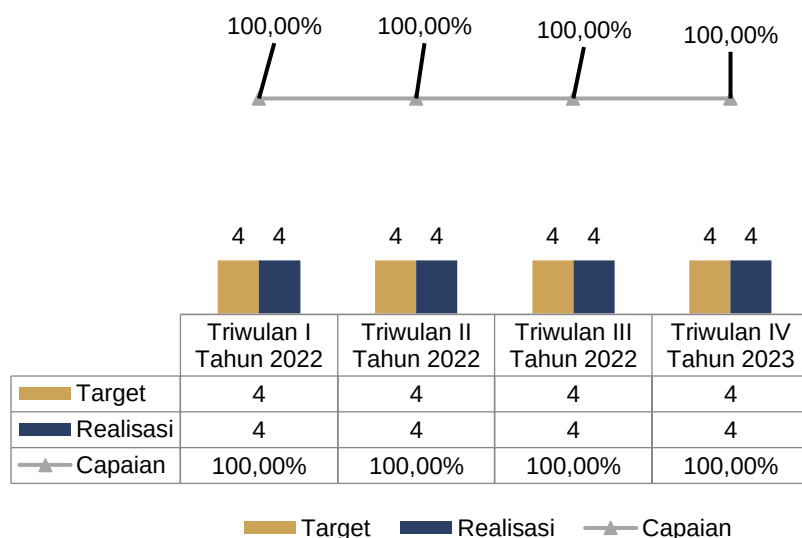
$$IKK1.2 = \text{Jumlah Simpul Transportasi Nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda}$$

Keterangan:

4 Lokasi Subsidi Angkutan Antarmoda KSPM Likupang :
Terminal Tangkoko Bitung;
Bandara Samratulangi;
Pelabuhan Penyeberangan Likupang;
Tempat Wisata Pantai Paal.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 4 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian, Gambar III.2 IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.



Gambar III.2 Capaian IKK1.2 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.478/PIR.301/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2020, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda pada Tahun 2022 Memiliki Persentase target sebesar 4 Lokasi dengan realisasi sebesar 4 Lokasi sehingga capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Subsidi Angkutan Antarmoda menghubungkan daerah-daerah Prioritas untuk memajukan Pariwisata Daerah tersebut.
- Dengan terlayannya Subsidi Angkutan Antar Moda dapat mempercepat pembangunan SDM di daerah tersebut;
- Dengan Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda Mempermudah Perjalanan Transportasi Masyarakat yang terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda.

- **Faktor Kendala**

- Jumlah Ritase Tidak Tercapai;
- Faktor Cuaca Buruk dapat mempengaruhi Pelayanan Angkutan Antar Moda dikarenakan Bus Damri tidak dapat melewati Lintasan/Rute tersebut;
- Kendaraan Mengalami Rusak Parah;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda Tahun 2022 sebagai berikut :

IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda = 4 Lokasi

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{4}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1,726,599,000. dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 1,115,583,110 atau mencapai 64.61% dengan Nomenklatur Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) – 4637.QAH.002

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Monitoring dan Pengawasan Untuk Tercapainya Ritase Pelaksanaan Subsidi;
- Monitoring dan pengawasan akan tetap di laksanakan untuk memastikan subsidi terealisasi dengan tepat.
- Monitoring dan Pengawasan berkala terhadap Kendaraan yang akan memenuhi Subsidi Antar Moda;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tahun 2022 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 4 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 2 Lokasi dengan target 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021 tetap sama dengan tahun 2022 yaitu dari 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SS 1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas						
1	2020	IK.1.	8	8	100%	-
SK 2 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.1.2	2	2	100%	Tetap
3	2022	IKK.1.2	4	4	100%	Tetap

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tahun 2022 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 4 Lokasi. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan maka capaian kinerja mencapai 2 Lokasi dengan target 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1.2	2	2	100%	-
2	2022	IKK.1.2	4	4	100%	Tetap

Tabel III.5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi, sedangkan terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai di bangun dan telah melayani Angkutan Barang Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dilingkungan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Untuk menghitung Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$IKK1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi}$$

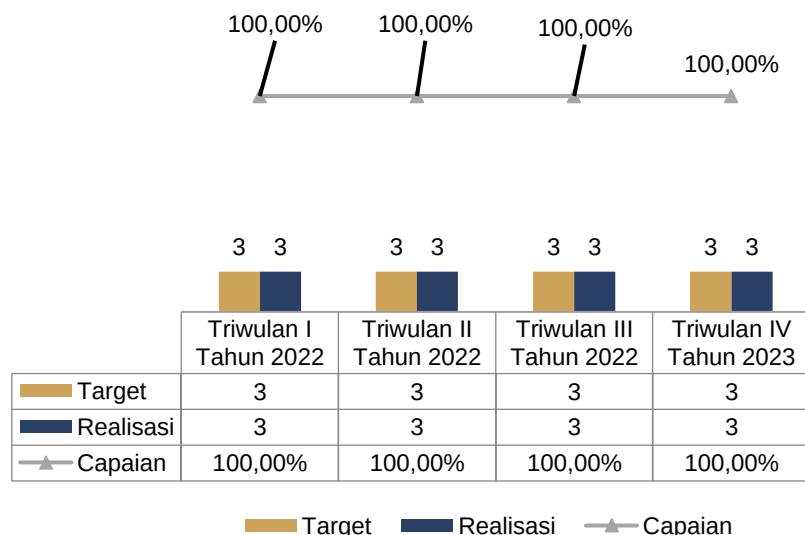
Keterangan:

Terminal Tipe A yang Beroperasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara :

1. Terminal Tipe A Tangkoko Bitung;
2. Terminal Tipe A Malalayang;
3. Terminal Tipe A Boroko.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 3 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian. Gambar III.3 IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar III.3 Grafik Capaian IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan PM Perhubungan Nomor: 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki Persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Dilaksanakan nya pengawasan inventarisir kebutuhan Terminal Tipe A untuk menunjang Operasional Terminal Tipe A;
- Dilakukan Pemeliharaan Terminal Tipe A secara berkala;
- Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Terminal Tipe A;
- Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Terminal Tipe A untuk menjamin keamanan dan Kenyamanan Terminal Tipe A;
- Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor terhadap Kendaraan AKAP dan AKDP;
- Tindaklanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Terminal Tipe A.

- **Faktor Kendala**

- Kurang nya Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Terminal Tipe A;
- Pemerintah tidak bisa menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna Jasa Terminal Tipe A;
- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam mengelola Terminal Tipe A;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2022 sebagai berikut :

IKK1.2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi = 3 Lokasi

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{3}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1,726,599,000. dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 1,115,583,110 atau mencapai 64.61% dengan Nomenklatur Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) – 4637.QAH.002

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan dilakukan Sosialisasi-Sosialisasi untuk pengguna Jasa untuk tetap menggunakan Jasa Terminal Tipe A agar menjadi salah satu pilihan Bertransportasi dalam berpergian;
- Akan dilakukan perbaikan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Terwujudnya Terminal Tipe A Serasa Bandara;
- Akan dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap Operator Bus agar tetap mematuhi Kepentingan bersama yaitu "Keselamatan Bertransportasi"
- Akan dilakukan Perbaikan Sistem Informasi untuk meningkatkan Kinerja Terminal Tipe A;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada tahun 2022 sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 3 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 3 Lokasi dengan target 3 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 yaitu dari 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SS 1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas						
1	2020	IK.1.	8	8	100%	-
SK 2 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.1.3	3	3	100%	Tetap
3	2022	IKK.1.3	3	3	100%	Tetap

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada tahun 2022 sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 3 Lokasi. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan maka capaian kinerja mencapai 3 Lokasi dengan target 3 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1.3	3	3	100%	-
2	2022	IKK.1.3	3	3	100%	Tetap

Tabel III.7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

Indikator Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

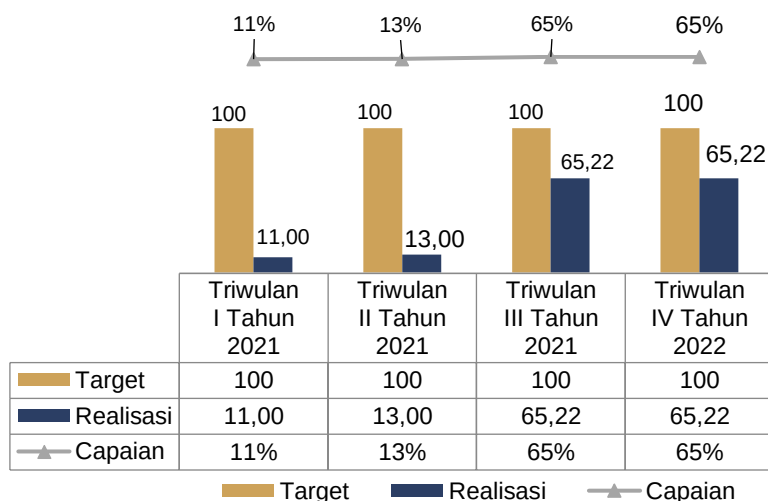
Keterangan:

Penetapan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan :

No	Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;		
1	Daerah Pananaru	16	Daerah Ruang
2	Daerah Kawaluso	17	Daerah Para
3	Daerah Marore	18	Daerah Kalama
4	Daerah Melonguane	19	Daerah Nusa
5	Daerah Miangas	20	Daerah Bukide
6	Daerah Biaro	21	Daerah Lipaeng
7	Daerah Tagulandang	22	Daerah Karatung
8	Daerah Makalehi	23	Pulau Kakarotang
9	Daerah Siau		
10	Daerah Buhias		
11	Daerah Manado Tua		
12	Daerah Bunaken		
13	Daerah Siladen		
14	Daerah Mangaran		
15	Daerah Lembeh		
	Total DTPK : 23		
	DTPK Terlayani Subsidi Perintis : 15		
	DTPK Belum Terlayani Subsidi Perintis : 8		

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 65,22 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 65,22%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian Gambar III.4 IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.



Gambar III.4 Grafik Capaian IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5856/AP204/DRJD/2018 tentang Perhitungan dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis untuk melayani kepulauan Terluar untuk memenuhi kebutuhan Transportasi Penyeberangan Masyarakat Umum, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2022 Memiliki persentase capaian sebesar 65,22% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini hampir mencapai target yang ditetapkan.

• Faktor Keberhasilan

- Koordinasi dengan dinas terkait untuk
- Tindaklanjuti Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan;
- Akan dilakukan Perbaikan terhadap Sarana dan Prasarana untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan;
- Tercapainya Kesenambungan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di Daerah Terpencil, Terisolir, dan Tertinggal serta Perbatasan.

- **Faktor Kendala**

- Faktor Cuaca Buruk dapat mempengaruhi Pelayanan Angkutan Keperintisan Penyeberangan;
- Faktor kerusakan pada Kapal Angkutan Perintis yang tidak di sengajai;
- Faktor dokumen berlayar tidak lengkap menyebabkan kapal tidak berangkat;
- Belum tersedianya Dermaga Kapal Penyeberangan yang memadai;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{15}{23} \times 100\% = 65,22\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{65,22\%}{100\%} \times 100\% = 65,22\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 42,684,000,000. dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 26,944,341,793. atau mencapai 63.13% dengan Nomenklatur POK Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Proritas Nasional) – 4637.QAH.008

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan di laksanakan koordinasi dengan pihak operator Kapal untuk melengkapi pemenuhan Dokumen sebelum keberangkatan Kapal untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa;
- Monitoring dan Pengawasan terhadap aspek keselamatan pada Kapal Angkutan Perintis;
- Akan tetap melakukan perbaikan dalam Sistem Informasi dalam hal pelaporan pelaksanaan Subsidi Angkutan Perintis agar dapat memudahkan Verifikator untuk memverifikasi Laporan setiap Operator Kapal;
- Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada tahun 2022 sebesar 65,22% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 65,22% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 100 Lokasi dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 100% menjadi 65,22%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	IK.9	17	17	100%	-
SK 2 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.1.5	100	100	100%	Tetap
3	2022	IKK.1.5	100	65,22	65,22%	Turun

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada tahun 2022 sebesar 65,22 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 100. Maka capaian kinerja mencapai 65,22%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 65,22 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 65,22% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1.5	100	100	100%	-
2	2022	IKK.1.5	100	65,22	65,22%	Turun

Tabel III.9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk Angkutan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan terdiri beberapa kelas (Kelas I, Kelas II dan Kelas III) sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan Umum untuk Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, Waduk dan Terusan, Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan, Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s, d tahun 2022 (n)

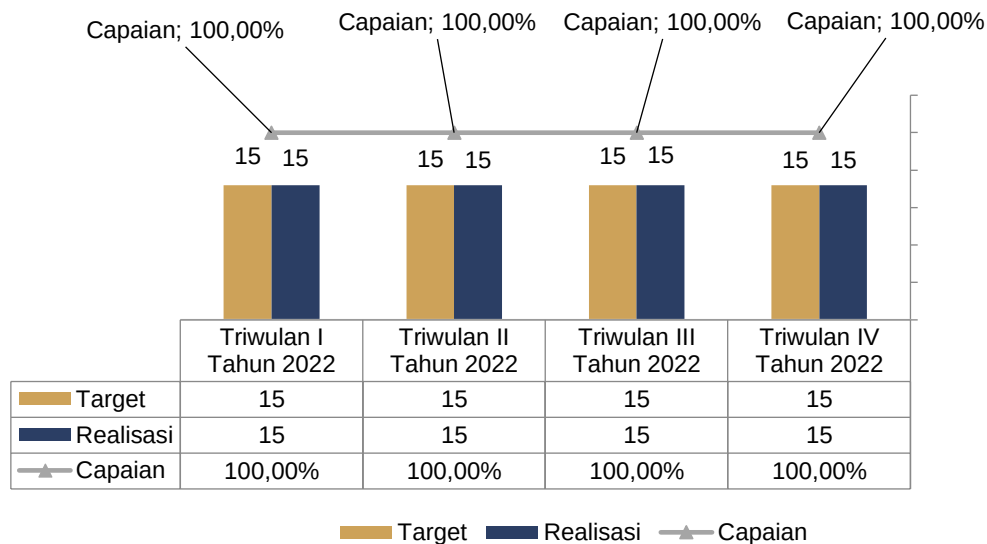
Keterangan:

Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung;
2. Pelabuhan Penyeberangan Amurang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh;
4. Pelabuhan Penyeberangan Likupang;
5. Pelabuhan Penyeberangan Biaro;
6. Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang;
7. Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau;
8. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru;
9. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso;
10. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane;
11. Pelabuhan Penyeberangan Marore;
12. Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan;
13. Pelabuhan Penyeberangan Musi;
14. Pelabuhan Penyeberangan Marampit;
15. Pelabuhan Penyeberangan Miangas

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebesar 15 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 15 maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.



Gambar III.5 Grafik Capaian IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Monitoring dan Pengawasan Pelayanan di 15 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini mencapai target yang di tetapkan.

• Faktor Keberhasilan

- Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Pelabuhan Penyeberangan untuk menunjang Operasional Pelabuhan Penyeberangan;
- Dilakukan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan secara berkala;
- Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan;
- Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Pelabuhan Penyeberangan untuk menjamin keamanan dan Kenyamanan Pelabuhan Penyeberangan;
- Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Kapal sebelum Berangkat
- Tindakanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan.

• Faktor Kendala

- Kurang nya Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
- Pemerintah tidak bisa menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan;
- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam mengelola Pelabuhan Penyeberangan;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{IKK1.5 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = 15 \text{ Lokasi} = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1,440,607,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 1,165,344,433 atau mencapai 80.89% dengan Nomenklatur POK Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dikelola – 4638.CDP.045

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan dilakukan perbaikan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya Pelabuhan Penyeberangan yang Aman dan Nyaman;
- Akan dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap Operator Kapal agar tetap mematuhi Kepentingan bersama yaitu "Keselamatan Bersama Dalam Bertransportasi"
- Akan dilakukan Perbaikan Sistem Informasi untuk meningkatkan Kinerja Pelabuhan Penyeberangan;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada tahun 2022 sebesar 15 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 15 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 100 Lokasi dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 yaitu dari 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	IK.9	17	17	100%	-
SK 2 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.1.6	15	15	100%	Tetap
3	2022	IKK.1.6	15	15	100%	Tetap

Tabel III.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada tahun 2022 sebesar 65,22 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 100. Maka capaian kinerja mencapai 65,22%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 65,22 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 65,22% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1.5	100	100	100%	-
2	2022	IKK.1.5	100	65,22	65,22%	Turun

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A;
IKK2.2 Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A;
IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang Memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan}} \times 100\%$$

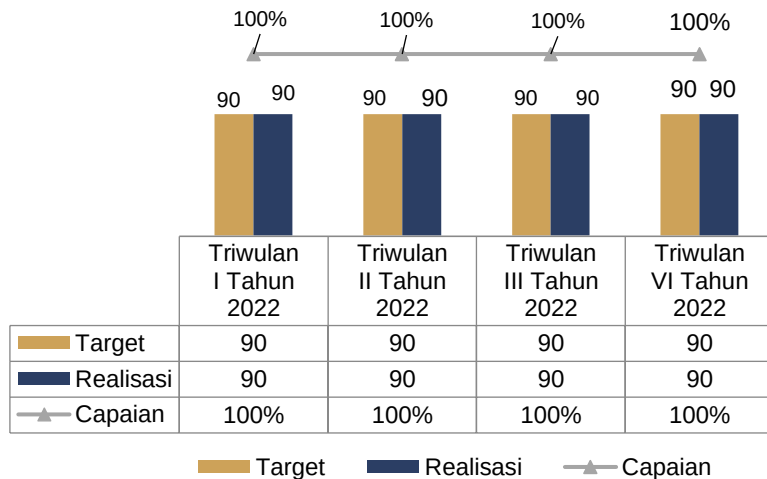
Keterangan :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A saat ini diukur hanya pada 3 Terminal Tipe A yang melayani di antaranya:

1. Terminal Tipe A Tangkoko;
2. Terminal Tipe A Boroko;
3. Terminal Tipe Malalayang;

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan sebesar 90 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 90 maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.



Gambar III.6 Grafik Capaian IKK2.1 Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup Pelayanan Keselamatan, Pelayanan Keamanan, Pelayanan Kehandalan/Keteraturan, Pelayanan Kenyamanan, Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan, Pelayanan Kesenjajaran.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%, dimana hal ini ditunjukkan dengan berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara.

• Faktor Keberhasilan

- Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Terminal Tipe A untuk menunjang Operasional Terminal Tipe A;
- Dilakukan Pemeliharaan Terminal Tipe A secara berkala;
- Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Terminal Tipe A;
- Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Terminal Tipe A untuk menjamin Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jasa Terminal Tipe A;
- Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Bus;
- Tindaklanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Terminal Tipe A.

- **Faktor Kendala**

- Tidak terpenuhinya Dokumen Standar Pelayanan sebagai dasar Pelayanan Terminal Tipe A;
- Tidak Berjalannya SOP pada Terminal Tipe A;
- Tidak Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Terminal Tipe A;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{4}{4} \times 90\% = 90\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{90\%}{90\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

-

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan di lakukan Evaluasi mandiri untuk memastikan Pelaksanaan SPM tetap berjalan sesuai SOP yang ada;
- Akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi untuk mendukung pelaksanaan SPM berjalan baik, dalam hal penyampaian Biaya/Tarif dan Produk layanan tersampaikan kepada pengguna jasa;
- Akan tetap terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang bisa di rasakan di Terminal Tipe A;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A pada tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A sebesar 90 Lokasi dengan target 90% maka capaian kinerja mencapai 90 Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.11	40	40	100%	-
SK 2 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
2	2021	IKK.2.1	90	90	100%	-
3	2022	IKK.2.1	90	90	100%	Tetap

Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A pada tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 90. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 90 dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.2.1	90	90	100%	-
2	2022	IKK.2.1	90	90	100%	Tetap

Tabel III.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal

Indikator Kinerja Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya : Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangaum Pelabuhan Penyeberangan Penajam, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

Keterangan :

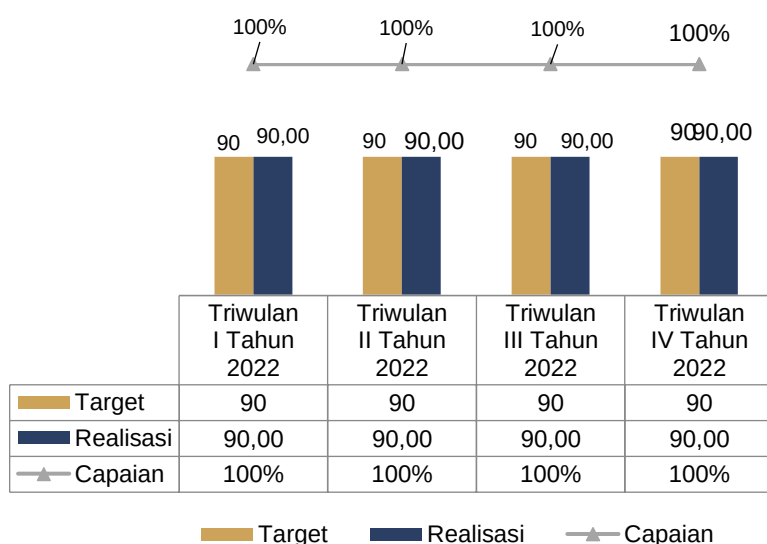
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 15 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani di antaranya:

1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung;
2. Pelabuhan Penyeberangan Likupang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Amurang;
4. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh;
5. Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau;
6. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru;
7. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane;
8. Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang;
9. Pelabuhan Penyeberangan Biaro;
10. Pelabuhan Penyeberangan Marampit;
11. Pelabuhan Penyeberangan Lirung;
12. Pelabuhan Penyeberangan Mangaran;

13. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso;
14. Pelabuhan Penyeberangan Marore;
15. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso;

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A sebesar 33,43 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 90 maka Capaian Kinerja mencapai 37,14%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK1.2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A.



Gambar III.7 Grafik Capaian IKK2.3 Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, pada Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 111% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Pelabuhan Penyeberangan untuk menunjang Operasional Pelabuhan SDP;
- Dilakukan Pemeliharaan Pelabuhan SDP secara berkala;
- Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Pelabuhan SDP;
- Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Pelabuhan SDP untuk menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan;
- Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Kapal;
- Tindaklanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan;

- **Faktor Kendala**

- Tidak terpenuhinya Dokumen Standar Pelayanan sebagai dasar Pelayanan Pelabuhan SDP;
- Tidak Berjalannya SOP pada Pelabuhan SDP;
- Tidak Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Pelabuhan SDP;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP Tahun 2022 sebagai berikut :

$$KK1.1 = \frac{15}{15} \times 90\% = 90\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{90\%}{90\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

-

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Akan di lakukan Evaluasi mandiri untuk memastikan Pelaksanaan SPM tetap berjalan sesuai SOP yang ada;
- Akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi untuk mendukung pelaksanaan SPM berjalan baik, dalam hal penyampaian Biaya/Tarif dan Produk layanan tersampaikan kepada pengguna jasa;
- Akan tetap terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang bisa di rasakan di Terminal Tipe A;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP pada tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP sebesar 90 Lokasi dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 100% Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 yaitu dari 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.9.4	100	100	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.2.3	90	90	100%	-
3	2022	IKK.2.3	90	90	100%	Tetap

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP pada tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 90. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 90 dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.2.3	90	90	100%	-
2	2022	IKK.2.3	90	90	100%	Tetap

Tabel III.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal;
2. IKK3.2 Penerapan SMART Terminal Tipe-A;
3. IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan;
4. IKK3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif;
5. IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan;
6. IKK3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)
7. IKK3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. IKK3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100$$

Keterangan:

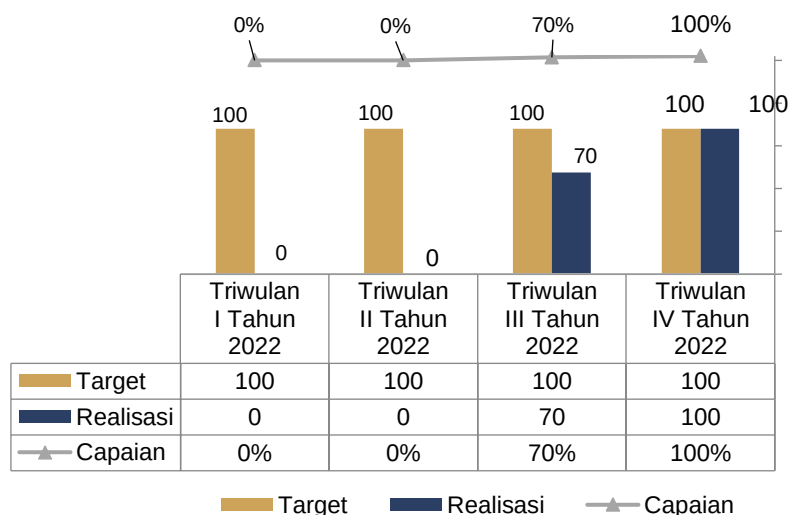
Ruas Jalan yang telah Terpasang Perlengkapan Jalan

1. Mamalia – Taludaa
2. Doloduo – Molibagu
3. Poopoh – Sinisir
4. Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim
5. Kaiya – Kotamobagu
6. Poigar – Kaiya
7. Matali – Torosik
8. Worotican – Poopoh
9. Kota Bitung
10. Kotamobagu – Doloduo
11. Onggunoi - Pinolosian

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan Terpasang	Total Persentase Jenis
1	Marka Jalan	1080	1080	100%
2	Paku Jalan	400	400	100%
3	Alat Pemberi Isyarat	2	2	100%
4	Rambu Standart	422	422	100%
5	RPPJ	2	2	100%
6	Pagar Pengaman	452	452	100%
7	Warning Light	1	1	100%
8	PJU Solar Cell	62	62	100%
9	PJU Listrik	10	10	100%
Total Capaian Keseluruhan		2431	2431	100%

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



Gambar III.8 Grafik Capaian IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4357/UM.303/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Teknis Bidang Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, pada Indikator Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Dapat menjadi petunjuk/pemberi informasi kepada pengguna jalan
- Membantu penerangan di lokasi jalan nasional
- Meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan

- **Faktor Kendala**

- Jika ada material yang tidak sesuai spesifikasi
- Sering di curi/di rusak (baterai PJU/WL, stiker scotlight)
- Petunjuk/informasi sering diabaikan oleh pengguna jalan;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{2431}{2431} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada Kondisi Ideal terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 9,150,043,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 3,433,502,296 atau mencapai 37.52% dengan Nomenklatur POK Perlengkapan Jalan – 4639.CAC.052

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Sementara dilakukan perencanaan proses lelang pekerjaan Fakses dimulai pada Bulan April;
- Masih mempersiapkan data-data serta berkoordinasi dengan Pokja terkait lelang pekerjaan Fakses yang tahun ini mulai menggunakan E-Catalog;
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP sebesar 100% Lokasi dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100% Jadi realisasi pada tahun 2022 memiliki kenaikan terhadap tahun 2021 yaitu dari 100% menjadi 111%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.14	1	1	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.3.1	100	100	100%	-
3	2022	IKK.3.1	100	100	100%	Tetap

Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada tahun 2022 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 100. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal maka capaian kinerja mencapai 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.3.1	100	100	100%	-
2	2022	IKK.3.1	100	100	100%	Naik

Tabel III.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB disbanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB;

Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB melalui aplikasi JTO.

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat berdasarkan Jumlah Tindakan Petugas dan Jumlah Pelanggaran ODOL dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kendaraan Barang Yang Melakukan Pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang Masuk Pada UPPKB}} \times 100\%$$

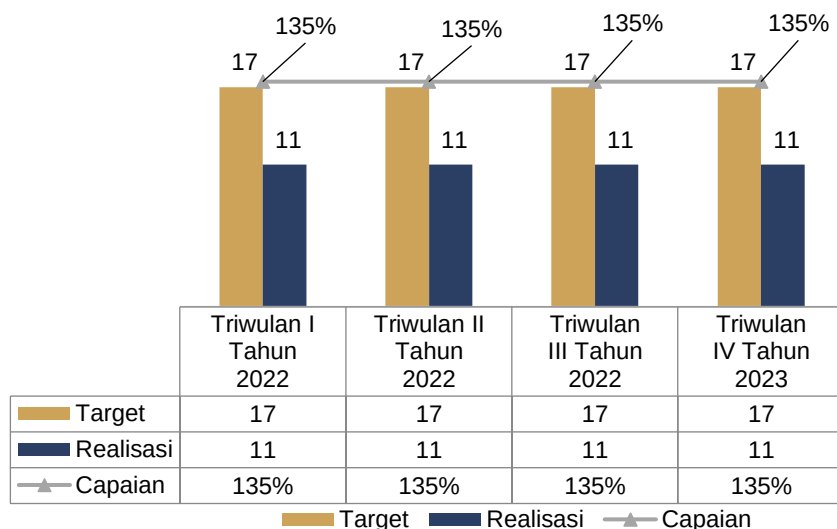
Keterangan:

UPPKB yang menerapkan penindakan ODOL:

1. UPPKB Wangurer Bitung
2. UPPKB Inobonto

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 11 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 17 maka Capaian Kinerja mencapai 135%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar III.9 Grafik Capaian IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4357/UM.303/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Teknis Bidang Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, pada Indikator Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki persentase capaian sebesar 135% yang menunjukkan bahwa realisasi Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

• Faktor Keberhasilan

- Mempunyai SDM yang ada;
- Fasilitas penunjang alat JTO yang ada;
- Setiap minggu selalu di lakukan penindakan seperti transfer muatan barang atau penurunan muatan barang dan putar balik kendaraan tersebut yg melebihi kapasitas daya angkut;
- Kegiatan target LHR angkutan barang terpenuhi.

- **Faktor Kendala**

- Tidak ada pendampingan dari instansi terkait seperti. POLRI dan TNI. Sering di curi/di rusak (baterai PJU/WL, stiker scotlight)
- Banyak kendaraan angkutan barang belum mempunyai buku uji elektronik
- Banyak pengemudi angkutan barang yg sudah melanggar kelebihan muatan atau lebih dari daya angkut suka melawan petugas;
- Kegiatan di siang dan malam kendala ada beberapa kali pengemudi ingin menabrak petugas pengaturan lalin yg di jalan

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{2197}{20611} \times 100\% = 11\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Pada Kondisi Ideal terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(17 - (11 - 17))}{17} \times 100\% = 137\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Operasional UPPKB Seluruh;

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi peraturan terkait kepada para pengusaha jasa angkutan barang, dll untuk menekan jumlah pelanggar;
- Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan patrol/piket serta kegiatan penegakan hukum lainnya untuk mendorong efektifitas kegiatan gakum serta memberikan efek jera kepada kendaraan yang masih melakukan pelanggaran;
- Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan penindakan pelanggar pada UPPKB di lingkungan BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara;

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2022 sebesar 11 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 17 maka capaian kinerja mencapai 135%, sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP sebesar 11 Lokasi dengan target 17 maka capaian kinerja mencapai 100% Jadi realisasi pada tahun 2022 memiliki kenaikan terhadap tahun 2021 yaitu dari 100% menjadi 111%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.14	1	1	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.3.2	17	11	135%	-
3	2022	IKK.3.2	17	11	135%	Tetap

Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada tahun 2022 sebesar 11 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 100. Maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal maka capaian kinerja mencapai 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.3.2	17	11	135%	-
2	2022	IKK.3.2	17	11	135%	Tetap

Tabel III.19 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan

Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS dan Batas Kecepatan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

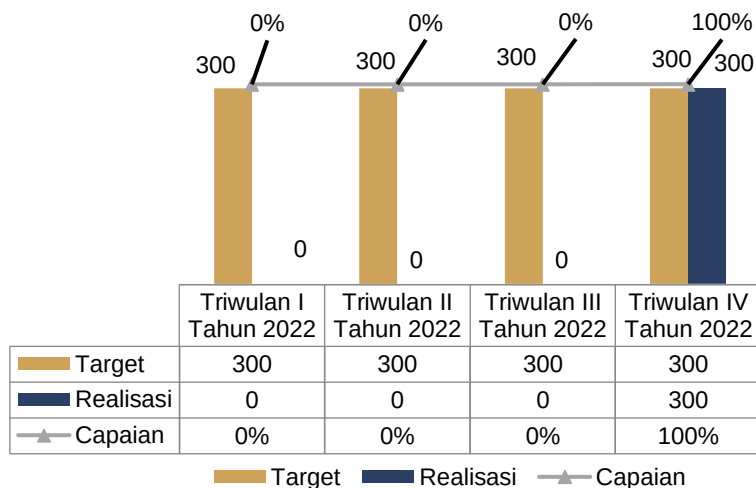
= Jumlah Kumulatif Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi Pada PNKJ

Keterangan

Sosialisasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 300 orang jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 300 orang maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



Gambar III.10 Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan transportasi jalan untuk menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran dalam berperilaku tertib berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Tersosialisasinya Masyarakat akan pentingnya Keselamatan Transportasi Jalan;.
- Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah;
- Tindakan lanjut hasil sosialisasi terhadap pengguna jasa.

- **Faktor Kendala**

- Tidak Tersosialisasinya kepada masyarakat dikarenakan faktor kegiatan tidak sesuai;
- Kurangnya persiapan sehingga kegiatan tidak terlaksana dengan baik;
- Kurangnya Sosialisasi pada masyarakat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK3.5 = \frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada Triwulan III Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 300,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 0 atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Proritas Nasional) – 4639.PEH.049

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan Sosialisasi yang telah diamanatkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan disesuaikan dengan anggaran yang telah di anggarkan pada Pagu Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara;
- Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk kelancaraan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Nasional;
- Berkoordinasi dengan Kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran tahun 2023 sesuai dengan target dan capaian terbaru.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2022 sebesar 300 Orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 300 Orang maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 2000 Orang dengan target 2000 Orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.13	1	1	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.3.5	2000	2000	100%	-
3	2022	IKK.3.5	300	300	100%	Tetap

Tabel III.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2022 sebesar 300 Orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 300 Orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 2000 Orang dengan target 2000 Orang capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.3.1	2000	2000	100%	-
2	2022	IKK.3.1	300	300	100%	Tetap

Tabel III.21 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor : KP 4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

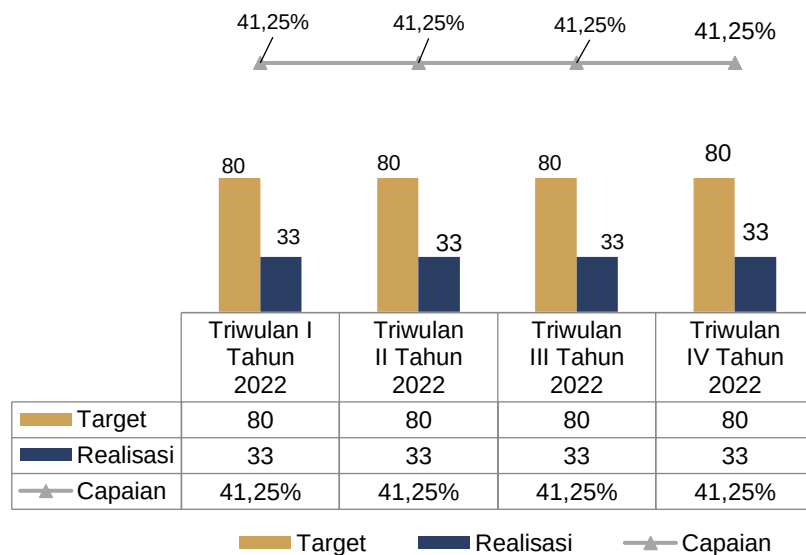
$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kabupaten) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

Keterangan

No	UPUBKB Terakreditasi	No	UPUBKB Belum Terakreditasi
1	UPUBKB Kota Tomohon	1	UPUBKB Kota Manado
2	UPUBKB Kota Kotabagu	2	UPUBKB Kota Bitung
3	UPUBKB Kabupaten Minahasa	3	UPUBKB Kabupaten Minahasa Utara
4	UPUBKB Kabupaten Minahasa Selatan	4	UPUBKB Kabupaten Minahasa Tenggara
5	UPUBKB Kabupaten Bolaang Mongondow	5	UPUBKB Bolaang Mongondow Selatan
		6	UPUBKB Bolaang Mongondow Timur
		7	UPUBKB Bolaang Mongondow Utara
		8	UPUBKB Kabupaten Kepulauan Sitaro
		9	UPUBKB Kabupaten Kepulauan Talaud
		10	UPUBKB Kabupaten Kepulauan Sangihe
Total UPUBKB : 15			
Total UPUBKB Terakreditasi : 5			
Total UPUBKB Belum Terakreditasi : 10			

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 33% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 80% orang maka Capaian Kinerja mencapai 41,25%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



Gambar III.11 Grafik Capaian IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor : KP 4404/AJ.502/DRJD/2020.

- **Faktor Keberhasilan**

- Menjamin keselamatan kendaraan yang telah berhasil lulus persyaratan teknis dan lain jalan;.
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan; dan
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

- **Faktor Kendala**

- Tidak adanya pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Angkutan Umum di Daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dikarenakan minimnya Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan BPTD;
- Masih banyaknya praktek pemalsuan kartu uji dan sertifikat;
- Masih banyak pemilik kendaraan yang tidak mau melakukan uji berkala;
- Kurangnya kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK3.7a = \frac{5}{15} \times 100\% = 33\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{33\%}{80\%} \times 100\% = 41.25\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada Triwulan III Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 300,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 0 atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Proritas Nasional) – 4639.PEH.049

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Memastikan dan mengupayakan unit pengujian kendaraan bermotor telah menggunakan alat uji yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga kendaraan bermotor dapat di uji secara akurat demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- Melaksanakan monitoring evaluasi dan pengawasan secara berkala;
- Peningkatan standarisasi kendaraan bermotor di tingkatkan pada simpul yang telah di tetapkan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 sebesar 33% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 41.25%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 33% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 33%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu dari 33% menjadi 41,25%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.13	1	1	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK3.7a	100	33	33%	-
3	2022	IKK3.7a	80	33	41.25%	Naik

Tabel III.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 sebesar 33% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 41.25%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 33% dengan target 100% capaian kinerja mencapai 33% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK3.7a	100	33	33%	-
2	2022	IKK3.7a	80	33	41.25%	Naik

Tabel III.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IKK 3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

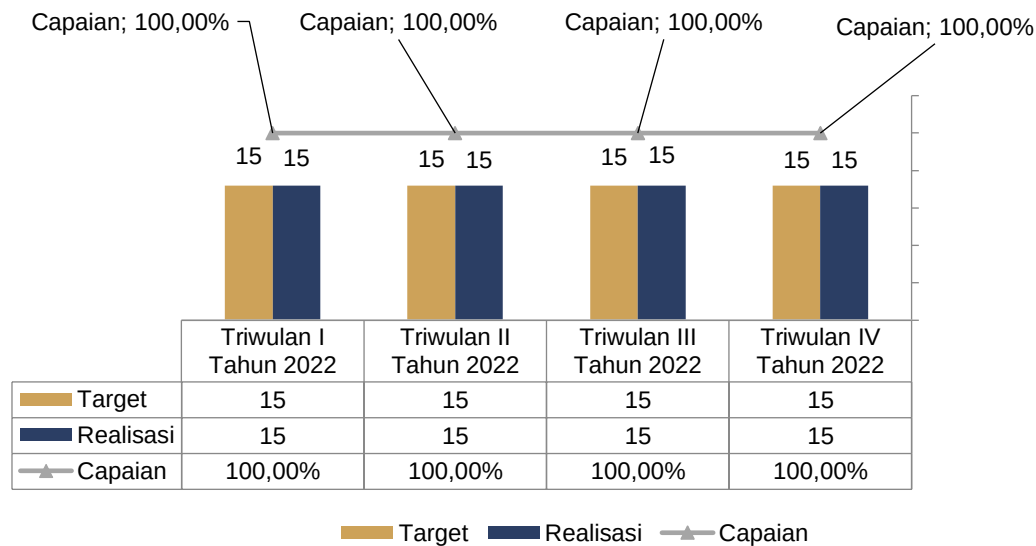
= Jumlah Fasilitas Keselamatan yang terbangun s. d Tahun (n)

Keterangan

Untuk fasilitas keselamatan alur pelayaran di Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan berjumlah 14 (empat belas) Unit yang terletak di Pelabuhan Penyeberangan Bitung, Pelabuhan Penyeberangan Likupang, Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang, Pelabuhan Penyeberangan Biaro, Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso, Pelabuhan Penyeberangan Marore, Pelabuhan Penyeberangan Pananaru, Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau/ Sawang, Pelabuhan Penyeberangan Marampit, Pelabuhan Penyeberangan Melonguane, Pelabuhan Penyeberangan Mangaran, Pelabuhan Penyeberangan Musi dan Pelabuhan Penyeberangan Miangas Untuk fasilitas keselamatan alur pelayaran di Danau Tondano yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang terdiri dari Rambu Danau sebanyak 8 (delapan) Unit dan Halte Danau sebanyak 6 (enam) Unit.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 15 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 15 Lokasi orang maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.



Gambar III.12 Grafik Capaian IKK 3.7b Jumlah Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, hampir seluruh Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sehingga terjaminnya Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan di alur Pelayaran Sungai dan Danau.

• Faktor Keberhasilan

- Monitoring secara berkala terhadap SBNP Setiap Pelabuhan;
- Melakukan Pemeriksaan secara berkala terhadap fungsi Fasilitas Keselamatan Pelabuhan Penyeberangan;
- Melakukan Pemeriksaan terhadap Sarana dan Prasarana Kapal dan Pelabuhan Penyeberangan.

• Faktor Kendala

- Keterlambatan Material Pabrikasi;
- Cuaca Buruk dan badai dapat memberikan dampak terhadap kerusakan pada Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelabuhan Penyeberangan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan.

• Realisasi Kinerja

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKK3.7b = \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada Triwulan III Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 300,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 0 atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Proritas Nasional) – 4639.PEH.049

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Demi meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran maka di perlukan penambahan berupa pelampung, rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain, Karang, Air Dangkal, Gosong, Kerangka Kapal, dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari;
- Melaksanakan monitoring Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran secara berkala;
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada tahun 2022 sebesar 15 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 15 maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 15 dengan target 15 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	IKK.6.13	1	1	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.4	15	15	100%	-
3	2022	IKK.3.7a	15	15	100%	Tetap

Tabel III.24 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 sebesar 33% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 41.25%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 33% dengan target 100% capaian kinerja mencapai 33% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.4	100	33	33%	-
2	2022	IKK.3.7a	80	33	41.25%	Naik

Tabel III.25 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 5. : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 5. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK5.1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Dan perencanaan anggaran
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- c. Aspek Keuangan;
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing- masing satuan kerja. Sedangkan,
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)
aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10	
	2	Perjanjian Kinerja	5	
	3	Pengisian input e-planning	5	
	4	pengisian input e-performance	5	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Format Terakhir)	6	
	2	Kompetensi	10	
	3	Kinerja	8	
	4	Disiplin	1	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
JUMLAH NILAI				

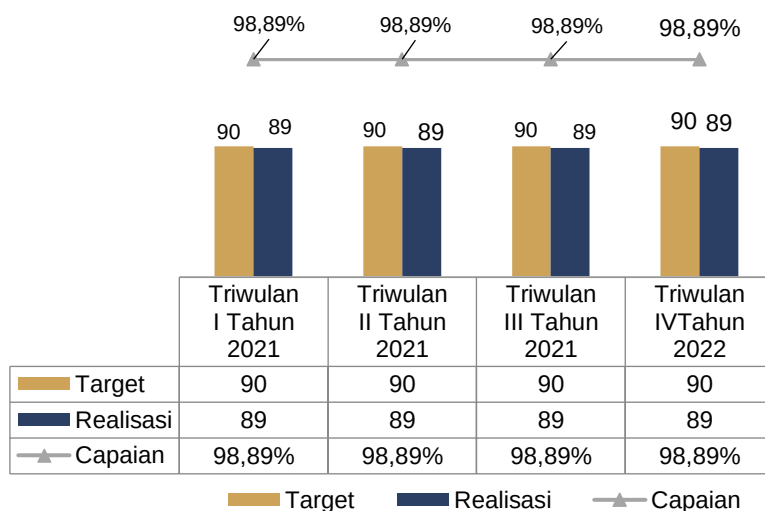
Keterangan

kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri atas 4 aspek :

- aspek perencanaan
- aspek kepegawaian
- aspek keuangan
- penyelenggaraan perkantoran.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 89 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 98,89, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK5. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



Gambar III.13 Grafik Capaian IKK 3.7b Jumlah Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2022 mempunyai nilai 89. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat hampir memenuhi target yang ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

- Dokumen LKIP dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun dan dikumpulkan tepat Waktu;
- Penginputan data pada aplikasi E-Performance setiap bulan dilaksanakan tepat waktu;
- Pengumpulan Laporan Bulanan pegawai tepat waktu;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Tercapainya Tingkat Penyerapan daya serap yang telah di targetkan;

- **Faktor Kendala**

- Pengumpulan Draft Perjanjian Kinerja setiap Kepala Seksi sering mengalami Keterlambatan;
- Realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan;
- Surat perintah membayar di tolak oleh KPPN dikarenakan data dukung pengajuan tidak lengkap
- pencairan dana termin kegiatan fisik tidak sesuai dengan jadwal pencairan.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

No	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	20,00
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10	8,00
	2	Perjanjian Kinerja	5	4,00
	3	Pengisian input e-planning	5	4,00
	4	pengisian input e-performance	5	4,00
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	21,00
	1	Kualifikasi (Pendidikan Format Terakhir)	6	5,00
	2	Kompetensi	10	8,00
	3	Kinerja	8	7,00
	4	Disiplin	1	1,00
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	24
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	24
JUMLAH NILAI				89

$$IKK3.7b = \frac{89}{90} \times 100\% = 98,89\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{98,89\%}{100\%} \times 100\% = 98,89\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan III Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 300,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 0 atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK Penunjang Teknis Transportasi Darat – 4640

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Menginpu Realisasi kegiatan pada aplikasi e-performance dan menyusun Dokumen SAKIP sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan anggaran yang tersedia agar realisasi anggaran terserap sengan target yang di tentukan;
- Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis;

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun 2022 sebesar 89 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 98,89%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 80 dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 88,98%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu dari 88,98% menjadi 98,89%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	-	-	-	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.5	90	80	88,98%	-
3	2022	IKK.5	90	89	98,89%	Naik

Tabel III.26 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun 2022 sebesar 89 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 98,89%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 80 dengan target 80 capaian kinerja mencapai 88,98% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.5	90	80	88,98%	-
2	2022	IKK.5	90	89	98,89%	Naik

Tabel III.27 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2 Rata-rata Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (Nilai x)	20	
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (Nilai y)	15	
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (Nilai z)	15	
JUMLAH NILAI			
JUMLAH CAPAIAN			

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

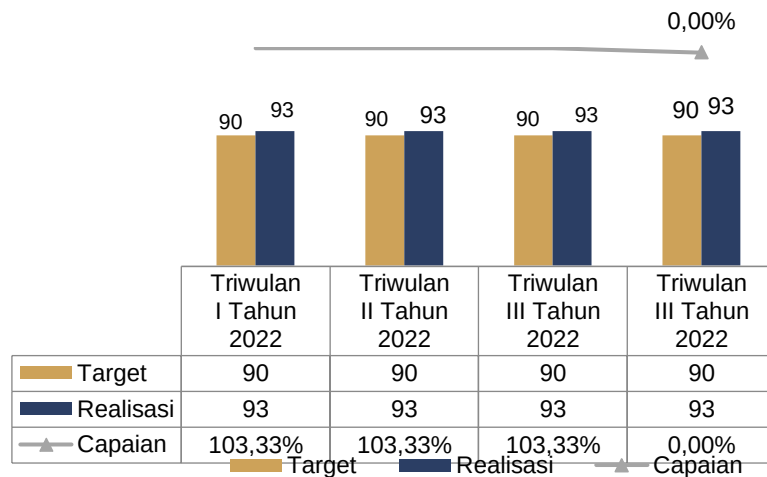
$$x = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$x = \frac{\text{Rata – Rata kecepatan internet (Unduh) di Kantor}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduk) di kantor}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 89 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 98,89, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK5. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



Gambar III.14 Grafik Capaian IKK 3.7b Jumlah Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara mempunyai nilai 93. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat hampir memenuhi target yang ditetapkan.

• Faktor Keberhasilan

- Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran;

- Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu
- **Faktor Kendala**
 - Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan;
 - Seluruh peraturan perundang-undangan yang baik harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya di tindaklanjuti;
 - Belum optimalnya sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD;
- **Realisasi Kinerja**
 Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

No	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	22,00
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	14,00
	2	Rata-rata Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV	10	8,00
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	25,00
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	46,00
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (Nilai x)	20	18,00
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (Nilai y)	15	13,00
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (Nilai z)	15	15,00
JUMLAH NILAI				93
JUMLAH CAPAIAN				103%

$$IKK3.7b = \frac{93}{90} \times 103\% = 103\%$$

- **Capaian Kinerja**
 Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Pada terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{103\%}{100\%} \times 100\% = 103\%$$

- **Realisasi Anggaran**
 Adapun Anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan IV Tahun 2022 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 300,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2022 Rp 0 atau mencapai 0% dengan Nomenklatur POK Penunjang Teknis Transportasi Darat – 4640

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas meja dan kursi;
- Menambah fasilitas meja dan kursi sesuai jumlah pegawai;
- Meningkatkan fasilitas internet kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Mengoptimalkan sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, dan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2022 sebesar 93 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 103%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu dari 100% menjadi 103%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
SP.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat						
1	2020	-	-	-	100%	-
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
2	2021	IKK.1	90	90	100%	-
3	2022	IKK.1	90	93	103%	Naik

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2022 sebesar 93 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 103%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 dengan target 90 capaian kinerja mencapai 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2021	IKK.1	90	90	100%	-
2	2022	IKK.1	90	93	103%	Naik

Tabel III.29 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021

IV

PENUTUP

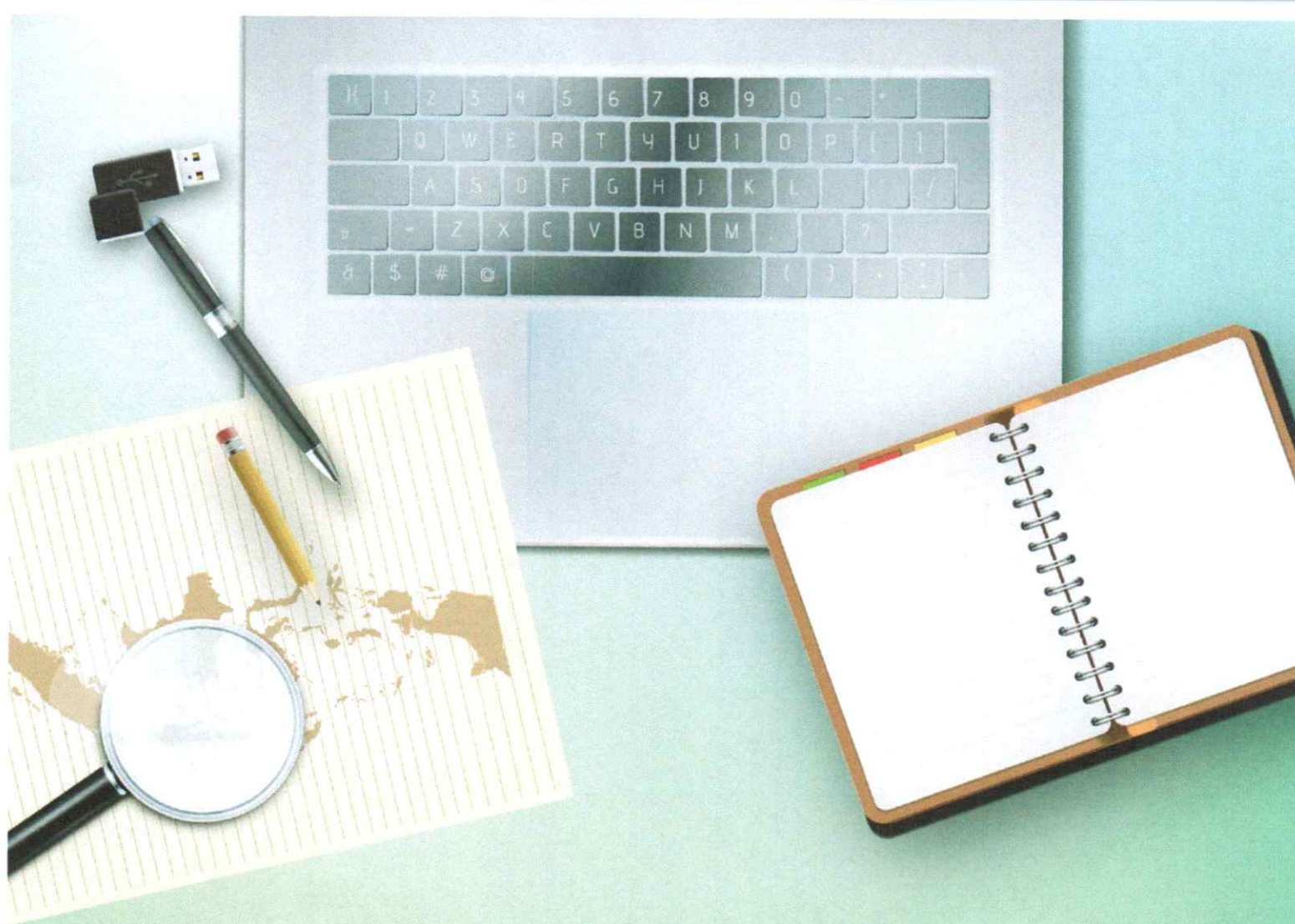
IV.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV Tahun 2022, ini terdapat 19 indikator kinerja BPTD XXII Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan IV tahun 2022. Terdapat 10 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 4 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% < IKP < 100\%$)
2. 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda dengan target 4 Lokasi dengan realisasi 4 Lokasi maka capaian 100%
 - 2) Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi dengan target sebesar 3 Lokasi dengan realisasi 3 Lokasi maka capaian 100%
 - 3) Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan target 15 Lokasi dengan realisasi 15 Lokasi maka capaian 100%
 - 4) Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A dengan target 90% dengan realisasi 90% maka capaian 100%
 - 5) Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP dengan target 90% dengan realisasi 90% maka capaian 100%
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan target 100% dengan realisasi 100% maka capaian 100%
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan target 17% dengan realisasi 11% maka capaian 135%
 - 8) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan target 300 Orang dengan realisasi 300 Orang maka capaian 100%
 - 9) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP dengan target 15 Lokasi dengan realisasi 15 Lokasi maka capaian 100%
 - 10) Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan target 90 Nilai dengan realisasi 93 Nilai maka capaian 103,33%
3. terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan dengan target kinerja yang belum tercapai dari target yang ditentukan tersebut yaitu:
 - 1) Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional dengan target 100% dengan realisasi 96,86% maka capaian 96,86%
 - 2) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dengan target 100% dengan realisasi 65,22% maka capaian 65%
 - 3) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target 80% dengan realisasi 33% maka capaian 41,25%

- 4) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan target 98,89% dengan realisasi 89 Nialai maka capaian 98,89%
4. Sedangkan terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan target kinerja sebesar (nol) sehingga belum mencapai realisasi capaian, Indikator Kinerja tersebut yaitu:
 - 1) Jumlah penyediaan fasilitas pendukung integrasi moda
 - 2) Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A
 - 3) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan
 - 4) Jumlah ketersediaan taman edukatif
 - 5) Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)
5. Untuk meningkatkan Capaian Kinerja di tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap kinerja untuk peningkatan pencapaian kinerja sesuai dengan target kinerja pada Tahun 2023.

LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN



2022

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WIL. XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA



ditjen_hubdat



hubdat151



ditjen_perhubungan_darat



hubdat.dephub.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	4
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-

		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	4
		IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	Laporan	1
		IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	Laporan	1
		IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	Laporan	1
		IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	Laporan	1
		IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	Laporan	1
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Manado, Januari 2022

KEPALA BPTD WILAYAH XXI
PROVINSI SULAWESI UTARA



RENHARD RONALD, S.Si.T, MT
NIP. 19720718 199503 1 001



ditjen_hubdat



hubdat151



ditjen perhubungan darat



hubdat.dephub.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BPTD

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RENHARD RONALD, S.Si.T, MT**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XXII PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perhubungan Darat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2022

PIHAK KEDUA

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PIHAK PERTAMA

RENHARD RONALD, S.Si.T, MT
NIP. 19720718 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	4
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-

		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	4
		IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Amurang	Laporan	1
		IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang	Laporan	1
		IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	Laporan	1
		IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	Laporan	1
		IKK3.1.2	Monitoring Rutin Satuan Pelayanan	Laporan	1
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 54.975.856.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 46.713.741.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 13.821.518.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 2.881.900.000
5.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.870.798.000
TOTAL		Rp. 134.263.813.000

PIHAK KEDUA



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Manado, Januari 2022

PIHAK PERTAMA



RENHARD RONALD, S.Si.T, MT
NIP. 19720718 199503 1 001

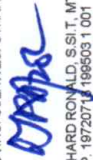
RENAKSI TAHUN 2022

KEPALA BPTD

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara



SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PEMANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
SK.1	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Kependidikan Angkutan Jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Transportasi Jalan
	IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda	Lokasi	1	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)											1		Seksi Transportasi Jalan
	IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Bering Yang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Pemungutan Tipe A					1						2		Seksi Transportasi Jalan
	IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pemadukan Dan Integrasi Moda	Lokasi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kependidikan Angkutan Penyelenggaraan	%	100	Layanan Angkutan Penyelenggaraan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Lalu Lintas ASDP
SK.2	IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan					5						10		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100	Operasional Terminal Pemungutan Tipe - A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Transportasi Jalan
	IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	100	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK3.1	Persentase Perencanaan Jalan Yang Tidak Terpasang Terhadap Kondisi Jalan	%	100	1. Bantuan Teknik Perencanaan Jalan 2. Pemeliharaan Perencanaan Jalan 3. Pengadaan dan Pemasangan Perencanaan Jalan Prioritas Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Transportasi Jalan
SK.3	IKK3.2	Persentase Pelaksanaan Pada UPPKB Dijalan Perhubungan Darat	%	2	Operasional UPPKB	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		Seksi Transportasi Jalan
	IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zon, RAS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	4	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSSS)					2						2		Seksi Transportasi Jalan
	IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersejahtera Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000	Pelaku Nasional Keselamatan Jalan	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167		Seksi Transportasi Jalan
	IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100	Operasional UPPKB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seksi Transportasi Jalan
	IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	4	1. Pelabuhan Penyelenggaraan Blung 2. Pelabuhan Penyelenggaraan Matogane					2						2		Seksi Lalu Lintas ASDP
	IKK3.8	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyelenggaraan Anurung	Laporan	1	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK3.9	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyelenggaraan Luapung	Laporan	1	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK3.10	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyelenggaraan Matogane	Laporan	1	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK3.1.1	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyelenggaraan Panaratu	Laporan	1	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK3.1.2	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Di Pelabuhan Penyelenggaraan Panaratu	Laporan	1	Operasional Pelabuhan Sungai, Derau, dan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
SK.5	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukung Televisi Transportasi Darat	Nilai	90	1. Bantuan Teknik Perencanaan Jalan 2. Pemeliharaan Dan Evaluasi Serta Laporan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		Subbagian Tata Usaha
SK.1	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perakortom Dijalan Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		Subbagian Tata Usaha

KEPALA BPTD WILAYAH XXII
(PROVINSI SULAWESI UTARA)


RENHARD RONALD, S.S.I.T. MT
NIP. 1972071199503 1 001



2022

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WIL. XXII PROVINSI SULAWESI UTARA



Revisi I Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Asri Indri Sri Lestari Tatontos Alexandro J. Pua	Pengelola Keuangan Petugas Administrasi dan Teknis		
2.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha		
3.	Disetujui	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha		
4.	Disetujui	Andy Parulian, S.E.	Kepala Seksi Transportasi Jalan		
5.	Disetujui	Venny W. Loho, AMd, LLASDP, S.H.	Kepala Seksi Lalu Lintas SDP Komersial dan Perintis		
6.	Disetujui	Yanuar Efan Thamrin, S.T.	Kepala Seksi Prasarana SDP Komersial dan Perintis		



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mangasi Sinaga, SE., SH., MM.
Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Agustus 2022

Pihak Kedua

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	4

		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK 3.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Program Dukungan Manajemen
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat

Anggaran

Rp54.206.356.000
Rp46.435.416.000
Rp13.821.513.000
Rp2.881.900.000
Rp15.870.798.000
Rp8.718.602.000

Disetujui

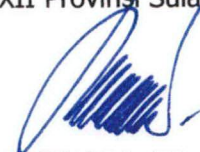
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Manado, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara



MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

REVISI I RENAKSI TAHUN 2022

KEPALA BPTD

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara



REVISI I RENAKSI TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp4.790.757.000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	1	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp1.726.599.000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	Terminal Penumpang Tipe-A Dikelola	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp5.892.420.000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp42.684.000.000	Seksi Lalu Lintas ASDP
	IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dikelola	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp1.440.807.000	Seksi Sarana dan Pemasarana ASDP
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Seksi Sarana dan Pemasarana ASDP
	IKK 3.1 Persentase perlekapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perlekapan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp9.150.043.000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17	-	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	4	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSSS)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	Rp1.564.495.000	Seksi Transportasi Jalan
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	Rp300.000.000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.6 Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNECE)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	Seksi Lalu Lintas ASDP
	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp2.881.900.000	Subbagian Tata Usaha
SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp7.152.196.000	Subbagian Tata Usaha

KEPALA BPTD WILAYAH XII
PROVINSI SUMATERA UTARA

BALAI PENGUSAHA
TRADE PROMOTOR
93 ALAKA DA NIVISSEDA

MANGASI SINAGA, S.E., S.H., M.M.
NIP. 19680729 198703 1 002

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mangasi Sinaga, SE., SH., MM.
Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Desember 2022

Pihak Kedua

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	4
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	17
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-

		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK 3.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat

Anggaran

Rp53.712.620.000
Rp36.967.086.000
Rp18.183.615.000
Rp3.880.818.000
Rp7.708.196.000
Rp9.760.414.000

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Manado, Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara



MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002

REVISI II RENAKSI TAHUN 2022

KEPALA BPTD

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara



REVISI II REMAKSI TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1.1	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp4,740,500,000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.2	Lokasi	4	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp1,595,000,000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.3	Lokasi	3	Terminal Penumpang Tipe-A Dikeola	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp6,092,420,000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 1.4	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 1.5	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp42,539,540,000	Seksi Lalu Lintas ASDP
	IKK 1.6	Lokasi	15	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dikeola	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp1,740,607,000	Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	%	90	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 2.2	%	-	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2.3	%	90	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Seksi Sarana dan Prasarana ASDP
	IKK 3.1	%	100	Persentase perlekapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp6,192,754,000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.2	%	17	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.3	Lokasi	-	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.4	Lokasi	-	Jumlah ketersediaan taman edukatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.5	Orang	300	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	Rp150,000,000	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.6	Unit	-	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.7a	%	80	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	Seksi Transportasi Jalan
	IKK 3.7b	Lokasi	15	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	Seksi Lalu Lintas ASDP
	IKK 5.1	Nilai	90	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp2,480,818,000	Subbagian Tata Usaha
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1.	Nilai	90	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Difin Perhubungan Darat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp7,563,196,000	Subbagian Tata Usaha

